

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai tingkat penyerapan belanja perjalanan dinas pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan bahwa tingkat penyerapan anggaran belanja perjalanan dinas secara keseluruhan mencapai 99,89% dari total pagu anggaran sebesar Rp6.477.484.000 dengan realisasi sebesar Rp6.470.129.544. Persentase tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sampai akhir tahun anggaran sehingga tingkat penyerapan anggaran dapat dikategorikan sangat baik.

Tingginya tingkat penyerapan anggaran menunjukkan bahwa pengelolaan belanja perjalanan dinas pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat secara umum telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung pelaksanaan kegiatan instansi selama Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut juga terlihat dari seluruh jenis belanja perjalanan dinas yang memiliki tingkat penyerapan di atas 99%.

Belanja Perjalanan Dinas Biasa menjadi jenis belanja dengan alokasi dan realisasi terbesar karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pembinaan, serta penugasan lapangan yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi instansi. Sementara itu, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota menjadi jenis belanja dengan

tingkat penyerapan tertinggi karena seluruh anggaran yang dialokasikan dapat direalisasikan sepenuhnya.

Meskipun tingkat penyerapan anggaran sudah tergolong sangat baik, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi penyerapan belanja perjalanan dinas. Kendala tersebut antara lain adanya perbedaan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi biaya di lapangan, adanya kegiatan yang batal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana, keterbatasan waktu dalam proses revisi anggaran, serta keterlambatan penyampaian dokumen pertanggungjawaban uang muka perjalanan dinas.

Namun demikian, berbagai kendala tersebut masih dapat dikendalikan dengan cukup baik sehingga pengelolaan belanja perjalanan dinas pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat tetap mampu mencapai tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi pada Tahun Anggaran 2025.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan belanja perjalanan dinas pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebagai berikut:

1. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan ketepatan dalam penyusunan anggaran perjalanan dinas dengan memperhatikan data realisasi tahun sebelumnya agar selisih antara anggaran dan realisasi dapat diminimalkan.

2. Pemantauan dan evaluasi realisasi anggaran perlu dilakukan secara berkala agar sisa anggaran dapat segera diketahui dan dialihkan melalui revisi anggaran sebelum batas waktu revisi berakhir.
3. Koordinasi antara pelaksana kegiatan dan bagian keuangan perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dapat berjalan sesuai rencana dan penyerapan anggaran tetap optimal.
4. Ketertiban administrasi, terutama dalam penyampaian dokumen pertanggungjawaban uang muka perjalanan dinas, perlu lebih diperhatikan agar proses pengelolaan dana dapat berjalan lebih lancar.

